

Sadewo, S., Muljanto, M. A (2023). Manajemen Strategi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dalam Upaya Mengurangi Angka Stunting Pada Anak Terlantar di LKSA di Provinsi Jawa Timur. *Prediksi* Vol. 22(3). 265-274.

Manajemen Strategi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dalam Upaya Mengurangi Angka Stunting Pada Anak Terlantar di LKSA di Provinsi Jawa Timur

Sadam Sadewo^{1*}, Muhammad Agus Muljanto²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: ¹sadamsadewo110@gmail.com, ²magusmuljanto@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

15 Oktober 2023

Received in revised form:

21 Oktober 2023

Accepted:

28 Oktober 2023

Keyword:

Social Services, Strategy Management, Stunting

Kata Kunci:

Dinas Sosial, Manajemen Strategi, Stunting

ABSTRACT

One of the goals of the East Java Provincial Social Service is to overcome poverty in East Java Province. The stunting rate among neglected children in Child Welfare Institutions (LKSA) is a crucial issue in the development of child welfare in East Java Province. This study analyzes the management strategies adopted by the East Java Provincial Social Service in overcoming the problem of stunting among neglected children in Child Welfare Institutions. This research uses a qualitative type of research with a descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation. Based on the research results, it is known that the East Java Provincial Social Service provides food assistance in the form of money which must be purchased by the Child Welfare Institution for nutritious food for neglected children in their institutions in order to reduce stunting among neglected children. However, monitoring and evaluation is needed to prevent misuse of funds from the government, so that the East Java Provincial Social Service can ensure that neglected children receive food appropriate to their age, thereby reducing the possibility of them being at risk of stunting.

ABSTRAK

Salah satu tujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah mengatasi kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Angka stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan isu krusial dalam pembangunan kesejahteraan anak di Provinsi Jawa Timur. Studi ini menganalisis manajemen strategi yang diadopsi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi masalah stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan permakanan dalam bentuk uang yang harus dibelikan makanan yang bergizi oleh pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak-anak terlantar di lembaganya guna mengurangi stunting pada anak terlantar. Meski demikian, diperlukan adanya monitoring dan evaluasi guna mencegah penyalahgunaan dana dari pemerintah, sehingga pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat memastikan anak-anak terlantar mendapatkan asupan yang sesuai umur mereka sehingga mengurangi kemungkinan mereka beresiko terjadi stunting.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

*Corresponding author: sadamsadewo110@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu harta yang paling berharga didalam sebuah keluarga. Pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan yang sah secara dimata hukum yang berlaku di Indonesia umumnya menginginkan kehadiran seorang anak yang ada didalam keluarga mereka. Dengan hadirnya sang anak, kedua orang tua berharap anak tersebut membawa dampak yang baik bagi keluarga mereka. Dengan memberikan pengasuhan yang baik dari suatu keluarga yang lengkap serta tersedianya fasilitas dasar menjadi suatu kebutuhan sang anak, dapat membentuk anak tersebut dengan baik, hal ini mencakup sisi fisik serta non fisik (Swara & Adhania, 2019).

Anak-anak yang tumbuh serta berkembang dengan baik seperti kondisi semestinya menjadi modal bagi bangsa dan negara untuk membantu dalam pembangunan yang berkesinambungan atau sustainable development, hal ini dikarenakan anak adalah generasi yang nantinya akan melanjutkan cita-cita serta perjuangan bangsa, selain itu anak juga akan menjadi sumberdaya manusia bagi masa depan bangsa nantinya. Oleh karena itu, negara mempunyai suatu kewajiban guna memastikan bahwa generasi penerus bangsa ini menjadi generasi yang berkualitas agar nantinya tidak menjadi beban negara.

Setiap anak di Indonesia seharusnya mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh gizi yang sesuai guna menunjang pertumbuhan mereka. Namun pada kenyataannya di lapangan, masih banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami stunting karena mereka hidup terlantar. Anak-anak terlantar dilatarbelakangi oleh banyak faktor, yang pertama karena sang anak tersebut telah ditinggal wafat oleh ibunya (piatu) atau ditinggal oleh bapaknya (yatim) dan kedua orang tuanya (yatim piatu) dan tidak memiliki kerabat serta saudara yang dapat menjadi peran untuk menggantikan kedua orangtuanya sehingga kelak akan mendidik anak tersebut (Sungkono, 2021). Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi, hal ini juga dapat mempengaruhi peningkatan jumlah anak terlantar yang ada di Provinsi Jawa Timur, banyak orang tua yang memilih menitipkan anak di panti asuhan agar para orang tua dengan alasan ekonomi sehingga tidak harus mengurus dan mengeluarkan biaya untuk anak tersebut, seperti biaya sekolah dan kebutuhan pokok anak tersebut. Banyak juga orangtua yang tidak menginginkan kehadiran anak tersebut sehingga mereka membuangnya ke tempat-tempat yang mereka harap bisa mendidik anak tersebut dengan lebih baik daripada mereka, seperti rumah warga, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan lain sebagainya.

Di LKSA, anak-anak ini mendapatkan bantuan, keamanan, serta kesempatan guna tumbuh serta berkembang dengan baik. Namun, keberadaan mereka di LKSA sering kali menjadi cermin dari kekurangan sistem dukungan sosial dan perlindungan bagi anak-anak di banyak negara. Pada banyak kasus, alasan anak-anak ini terlantar bervariasi, mulai dari masalah ekonomi, permasalahan keluarga, hingga berbagai faktor sosial yang kompleks. Penting untuk memahami bahwa setiap anak memiliki hak untuk merasa aman, dicintai, dan memiliki akses terhadap pendidikan serta perawatan kesehatan yang layak. Namun, realitas anak terlantar di LKSA menunjukkan bahwasannya masih ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memastikan setiap anak memiliki lingkungan yang stabil dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang.

Anak-anak yang memiliki masalah pada kesejahteraan cenderung memiliki masalah seperti sulitnya bagi mereka untuk tumbuh serta berkembang layaknya anak pada umumnya. Sehingga mereka memerlukan bantuan administrasi serta arahan yang baik dari orang tua alternatif agar mereka mampu untuk menjalani kebutuhan dan tugas hidup mereka. Pada umumnya, anak-anak diharuskan untuk memilih pilihan hidup mereka masing-masing guna memenuhi kebutuhan serta hak istimewa mereka. Namun keadaan yang justru menyuruh

mereka untuk hidup dibawah tekanan. Didalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945, menerangkan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh Negara". Dengan adanya Undang-Undang ini sudah menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab atas anak-anak terlantar, baik yang berada di jalan serta berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (Ruswanto & Senjaya, 2023).

Anak- anak terlantar adalah suatu masalah bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang mana perlu mendapatkan perhatian serta pemenuhan gizi sehingga mereka dapat tumbuh seperti kebanyakan anak seumurannya, hal ini dikarenakan setiap anak mempunyai potensinya masing-masing yang mana potensi tersebut apabila digali dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa dan negara nantinya. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan anak-anak terlantar, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak seusianya. Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Anak dan Lanjut Usia (Rhesos Anlu) mempunyai tugas untuk menangani permasalahan tersebut. Banyaknya anak terlantar yang ada di Jawa Timur, menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur kurang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemerintah seharusnya dapat menjamin kesejahteraan setiap individu (Santoso et al., 2022)

Dengan pemenuhan gizi yang cukup, diharapkan anak-anak terlantar yang ada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak seusianya. Dengan begitu diharapkan anak-anak tersebut kelak akan menjadi Sumberdaya yang unggul guna membangun Indonesia nantinya. Selain itu, perlunya dukungan untuk mengembangkan kemampuan mereka juga mempunyai dampak cukup penting guna mereka untuk melanjutkan kehidupannya kelak dilingkungan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan sarana tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk memelihara anak terlantar.

Upaya bersama dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta individu-individu yang peduli sangat penting untuk memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan anak terlantar. Mendorong perlindungan anak, memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemulihan psikososial merupakan langkah awal yang krusial dalam menjaga hak-hak anak serta memberikan mereka masa depan yang lebih cerah.

Upaya pemerintah yang telah dilakukan oleh dinas sosial guna mengatasi permasalahan tersebut adalah membuat lembaga pengasuhan alternatif atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga ini merupakan lembaga pengasuhan alternatif yang diperuntukkan bagi anak terlantar yang sebelumnya lembaga ini diberi nama Panti Asuhan, dengan munculnya Permensos 30/HUK/2011 berubah nama menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang disingkat menjadi LKSA (Susilowati, 2022). Anak-anak terlantar yang dirujuk ke dalam LKSA kebanyakan merupakan anak yang memiliki permasalahan sosial seperti hilangnya pengasuhan dari orangtua dan hambatan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang berkualitas seperti kekerasan sehingga mereka memerlukan pengasuhan yang lebih baik.

Dengan adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini, menjadi tempat untuk anak terlantar mendapatkan orang tua alternatif, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki tugas untuk mengontrol dan mengevaluasi anak-anak terlantar yang ada di dalam LKSA sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang baik terutama dari segi asupan mereka. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur harus memastikan asupan yang mereka konsumsi harus memiliki gizi yang bagus dan sesuai dengan anak-anak usia mereka. Dengan penjelasan pendahuluan diatas,

maka bisa diambil rumusan masalah tentang bagaimana strategi dinas sosial Jawa Timur dalam upaya mengurangi angka stunting pada anak terlantar di LKSA di Provinsi Jawa Timur.

Tabel. 1 Jumlah Anak Terlantar di LKSA Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Kategori Usia	Jumlah
Anak TK	4899
Anak SD	20922
Anak SMP	22799
Anak SMA	14945
Anak Tidak Sekolah	2106
Total	65671

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna memahami lebih luas dan mendalam tentang strategi dan upaya Dinas Sosial Jawa Timur dalam upaya mengurangi angka stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi Jawa Timur. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait dengan masalah manusia dan sosial, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mana fokus pada mendeskripsikan permukaan dari suatu realitas (Muhammad et al., 2021). Menurut Sukmadinata dalam (Rohayedi & Maulina, 2020) penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang biasa digunakan guna menggambarkan suatu fenomena yang sedang berlangsung maupun fenomena yang sudah lampau.

Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, subjek yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani permasalahan sosial anak adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pemilihan subjek ini dikarenakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki peran aktif keikutsertaannya dalam mengurangi angka stunting pada anak terlantar didalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Jenis wawancara, dokumentasi dan observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan secara terstruktur serta observasi dengan cara terstruktur atau tersamar.

1. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mana sumbernya langsung dari hasil komunikasi narasumber dan peneliti.
2. Dokumentasi, merupakan suatu teknik yang menghimpun suatu data dari dokumen yang dimiliki oleh narasumber baik gambar maupun tulisan.

3. Observasi, merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data, yang mana didapatkan dengan meneliti secara langsung objek yang akan dijadikan penelitian sehingga peneliti dapat membuktikan kejadian yang sebenarnya.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data diperlukan suatu teknik analisis, teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, serta penyajian data, penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data adalah suatu teknik analisis yang merupakan suatu kegiatan pencarian data yang guna menjawab masalah yang ada di penelitian.
2. Reduksi data merupakan suatu proses yang memiliki, menyederhanakan dan mentransformasikan data kasar yang ada di lapangan ke dalam penelitian.
3. Penyajian data adalah kegiatan dalam pembuatan hasil penelitian yang ditujukan agar dapat dengan mudah dipahami serta dianalisis.
4. Kesimpulan, merupakan tahap dimana peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan memahami hal/proses apa saja yang telah diuji kebenarannya.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil dari analisis data dari hasil penelitian diatas, maka penulis mengkaji permasalahan tentang Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting Pada Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi Jawa Timur. Kajian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David (2011) yang mana teori ini memiliki tiga dimensi, yaitu formulasi, implementasi serta evaluasi. Dengan demikian maka dihasilkan pembahasan sebagai berikut.

FORMULASI STRATEGI

Visi, Misi dan Tujuan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, dinas sosial harus mempunyai dasar yang digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Apabila dilihat dari Visi dan Misi nya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ingin mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan mempunyai akhlak yang partisipatoris inklusif dengan kerja bersama serta mempunyai semangat gotong royong yang tinggi. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga ingin menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang mengutamakan kesejahteraan kesehatan dan pendidikan, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang memperhatikan kelompok masyarakat rentan.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan guna mengatasi permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat Provinsi Jawa Timur. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dengan adanya tujuan diatas, Dinas Sosial Provinsi berharap kesejahteraan sosial akan meningkat sehingga meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki Provinsi Jawa Timur.

Peluang dan Tantangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengurangi angka anak terlantar di Jawa Timur, Dinas Sosial mempunyai seksi yang bernama Seksi Anak dan Lanjut, seksi ini memiliki peluang dari permasalahan yang ditangani oleh Dinas Sosial tersebut. Permasalahan anak semakin hari

semakin bervariasi dan semakin banyak jumlahnya dari tahun ke tahun, maka dari itu Seksi Anlu Dinas Sosial Jawa Timur melakukan suatu kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Selain itu, berkembangnya lembaga sosial yang peduli permasalahan kesejahteraan sosial juga turut menjadi peluang bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, hal ini diindikasikan semakin meningkatnya jumlah LKSA di masyarakat.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki tantangan seperti kurangnya kesadaran pihak LKSA dalam memberi asupan anak-anak terlantar sehingga Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur harus memonitoring serta evaluasi ke LKSA guna memastikan anak-anak terlantar sehingga mereka mendapatkan asupan yang cukup agar mereka tumbuh dengan baik sesuai usia mereka sehingga tidak stunting. Selain itu Tantangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah mudahnya masyarakat untuk mengambil informasi dari media sosial. Pada saat ini informasi bisa didapatkan dengan mudah dimedia sosial, yang mana berita dapat mudah tersebar dan viral sehingga mendapat respon dari berbagai masyarakat. Dan apabila ada aduan dari masyarakat terkait dengan permasalahan anak terlantar yang seharusnya dinas sosial dapat selesaikan, maka itu akan menjadi masalah untuk dinas sosial dan akan berjejing dengan instansi dan lembaga terkait. Selain itu, tingginya angka anak terlantar yang ada di Provinsi Jawa Timur menyebabkan semakin banyaknya permasalahan sehingga Dinas Sosial Jawa Timur harus bekerja secara ekstra untuk mengembalikan kondisi tersebut menjadi kondisi semula yang diinginkan.

Kekuatan dan Kekurangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur sendiri memiliki Kabupaten/Kota yang berjumlah 38, dengan jumlah Kabupaten/Kota sebanyak itu dan pegawai Seksi Anlu Dinas yang hanya berjumlah 9 orang, maka Seksi Anlu Dinas Sosial Jawa Timur kesulitan untuk menjangkau semua daerah tersebut. Apalagi ditambah anggaran yang digelontorkan untuk Seksi Anlu sangat minim sehingga harus meminimalisir pengeluaran sehingga kurang maksimalnya Seksi Anlu untuk menjangkau daerah-daerah tersebut.

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Seksi Anlu Dinas Sosial Jawa Timur dalam mengatasi terkait permasalahan anak di Provinsi Jawa Timur yaitu dapat dilihat dari segi ketepatan sasaran yang dilakukan oleh Seksi Anlu Dinas Sosial Jawa Timur. Seksi Anlu Dinas Sosial Jawa Timur memiliki tugas dan wewenang untuk memelihara anak-anak terlantar yang berada di dalam panti, bantuan yang diberikan Seksi Anlu Dinas Sosial Jawa Timur untuk anak terlantar di dalam LKSA dapat dibidang tepat sasaran dan bisa langsung dirasakan oleh anak terlantar di LKSA tersebut. Sebelum Seksi Anlu Dinas Sosial Jawa Timur memberikan bantuan permakanan tersebut Seksi Anlu Dinas Sosial Jawa Timur akan memverifikasi sehingga bantuan yang didapat dapat tepat sasaran kepada anak yang layak mendapatkan bantuan.

IMPLEMENTASI STRATEGI

Mengimplementasikan Kebijakan

Dalam menjalankan tugas guna memonitoring anak terlantar, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berpedoman dan bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Perangkat Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai aspek terkait struktur, organisasi, dan tugas pemerintahan di tingkat daerah di Indonesia.

Selain dari undang-undang tersebut, dinas sosial juga berpedoman pada Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kab./Kota. Peraturan ini merupakan peraturan yang mengatur tentang standar teknis dan pelayanan dasar di bidang sosial yang harus dipenuhi oleh daerah provinsi,

kabupaten, dan kota di Indonesia. Isinya terfokus pada menetapkan standar pelayanan minimal yang harus diberikan oleh pemerintah daerah di bidang sosial untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang sosial yang berkualitas, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan-layanan dasar yang penting untuk kesejahteraan mereka.

Alokasi Sumber Daya

Sumber pendanaan Dinas Sosial guna menangani anak terlantar di Jawa Timur hanya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Sehingga dana tersebut dianggap kurang oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, akibatnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur harus menghemat anggaran yang ada. Sehingga dengan minimnya dana APBD menjadikan kurang maksimalnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk memonitoring dan evaluasi seluruh LKSA yang ada di Provinsi Jawa Timur

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Anlu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berjumlah 9 orang, dengan 6 Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK). Dengan jumlah ini, Seksi Anlu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur masih belum mampu untuk menjangkau 38 Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi.

Dalam membantu pekerjaan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mempunyai pilar-pilar sosial yang ikut berperan dalam kesejahteraan sosial masyarakat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menggandeng beberapa stakeholder atau pihak eksternal guna memaksimalkan monitoring dan evaluasi LKSA. Pilar sosial tersebut terdiri dari Taruna Siaga Bencana, karang taruna, SDM pendamping PKH, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), serta Pekerja Sosial Masyarakat (Peksos).

Strategi Dinas Sosial Jawa Timur Dalam Mengurangi Angka Stunting Pada Anak Terlantar di Dalam LKSA

Strategi yang digunakan Dinas Sosial Jawa Timur dalam mengurangi angka stunting pada anak terlantar di dalam LKSA adalah dengan memberikan bantuan sosial berupa permakanan. Bantuan sosial ini diharapkan dapat memperbaiki gizi anak terlantar di dalam LKSA sehingga pertumbuhan anak-anak tersebut sesuai dengan anak seusianya yang lain. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga memonitoring dan mengevaluasi terhadap setiap LKSA sehingga bantuan dana permakanan yang telah diberikan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur digunakan oleh pihak LKSA dengan maksimal sehingga gizi anak-anak terlantar dalam LKSA tercukupi. Dengan tercukupinya gizi anak-anak terlantar, angka stunting dapat ditekan sehingga kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial meningkat. Dengan meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial, hal ini telah menjadikan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

EVALUASI

Dengan strategi yang Dinas Sosial lakukan untuk mengurangi angka stunting pada anak di dalam LKSA, dapat dikatakan cukup berhasil. Pasalnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sangat menjaga ketat asupan yang diberikan oleh pihak LKSA dengan cara memonitoring dan mengevaluasi pihak LKSA agar mereka memberikan hak kepada anak-anak terlantar sehingga kebutuhan asupan mereka dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya asupan mereka, anak-anak terlantar tersebut angka kesejahteraan hidupnya bisa meningkat sehingga mengurangi kemungkinan mereka menyandang stunting. Pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

mengharuskan Pihak LKSA memberikan makanan yang mengandung mineral, karbohidrat, vitamin dan protein yang cukup guna menunjang pertumbuhan anak terlantar sehingga mengurangi resiko anak tersebut mengalami stunting.

Dengan strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berhasil menekan angka stunting yang ada di dalam LKSA. Bantuan permakanan yang telah diberikan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, anak-anak terlantar yang ada dalam LKSA mendapatkan asupan makanan yang baik, sehingga dengan ini mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan anak diusia mereka. Oleh karena ini, anak-anak terlantar akan lebih siap untuk kehidupan yang lebih baik setelah mereka dewasa nanti, mereka akan lebih siap untuk menjadi masyarakat yang memiliki kualitas unggul.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengharuskan mereka membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan sedetail mungkin dan apabila mereka memberikan makanan yang kurang layak kepada anak-anak terlantar, maka pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur akan mendatangi dan menegur pihak LKSA dengan teguran keras dengan mencabut izin LKSA tersebut.

PEMBAHASAN

Dengan adanya program bantuan permakanan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ini dapat membantu menambah gizi anak-anak terlantar yang ada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga membantu dalam mengurangi beban pihak lembaga untuk memelihara anak-anak terlantar, dengan bantuan yang diberikan oleh dinas sosial maka kebutuhan lembaga yang seharusnya dibelikan bahan makanan bisa dialokasikan kepada kebutuhan yang lain seperti kebutuhan sekolah, pakaian dan lain sebagainya.

Dengan memberikan bantuan kepada anak terlantar, pemerintah juga telah menjalankan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang aman pasal ini menyatakan bahwasannya "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Pasal ini menegaskan tanggung jawab negara terhadap perlindungan, kesejahteraan, dan perkembangan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Pemerintah Indonesia diamanatkan untuk memastikan kondisi yang aman, sejahtera, dan pembangunan secara fisik dan spiritual bagi anak-anak. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, serta pemberian akses yang layak terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka.

Jika dilihat dari Visi dan Misi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya yang sangat baik dalam mengurangi angka stunting yang ada di lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak yang ada di seluruh Provinsi Jawa Timur. Dalam implementasinya dinas sosial memberikan bantuan permakanan guna menunjang gizi pada anak-anak terlantar. Hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh dinas sosial, hal ini karena bantuan yang diberikan cukup merata diseluruh Provinsi Jawa Timur. Monitoring yang telah dilakukan oleh pihak dinas sosial juga cukup baik. Namun demikian, ada beberapa kendala yang menjadikan kurang maksimalnya dinas sosial dalam menjalankan tugasnya, seperti kurangnya sumberdaya yang ada di dinas sosial baik itu anggaran maupun jumlah pegawai yang ada.

Dinas sosial Provinsi Jawa Timur juga dapat dikatakan menjalankan tugas dengan baik karena sudah mengimplementasikan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya dinas sosial dalam memberikan bantuan permakanan yang merata ke seluruh LKSA di Provinsi Jawa Timur, selain itu dinas sosial juga aktif dalam monitoring dan evaluasi guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh dinas sosial dapat dirasakan oleh anak terlantar di dalam LKSA.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bekerja sesuai dengan pedoman mereka, yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Perangkat Daerah serta Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kab./Kota.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur membuat strategi dengan memberikan bantuan sosial permakanan guna menunjang kebutuhan gizi anak terlantar yang ada di Provinsi Jawa Timur sehingga menurunkan resiko mereka untuk terkena stunting. Kurangnya kesadaran pihak LKSA terhadap asupan gizi anak terlantar menjadikan tantangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi angka stunting pada anak-anak terlantar didalam LKSA. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat memastikan anak-anak terlantar mendapatkan asupan yang sesuai umur mereka sehingga mengurangi kemungkinan mereka beresiko terjadi stunting.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mempunyai hambatan seperti kurangnya sumberdaya manusia yang menyulitkan bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk menjangkau keseluruhan Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian maka proses untuk memantau anak-anak terlantar akan menjadi lebih lama daripada waktu yang seharusnya dapat dilakukan. Namun demikian, pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki pilar-pilar yang akan membantu Dinas Sosial dalam melakukan tugasnya seperti Taruna Siaga Bencana, karang taruna, SDM pendamping PKH, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), serta Pekerja Sosial Masyarakat (Peksos). Selain kurang dari sumberdaya manusia, dana yang diberikan oleh pemerintah juga dianggap kurang oleh pihak dinas sosial. Dinas sosial hanya memperoleh dana dari APBD yang dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan permakanan setiap anak yang ada didalam LKSA di seluruh Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, A. H. P., Mutiani, & Jumriani. (2021). Pendidikan Karakter Anak Jalanan di Sekolah Kelas Khusus Pasar Lima Banjarmasin. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 7(2).
- Rohayedi, E., & Maulina. (2020). KONSUMERISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Transformatif*, 4(1), 34. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF>
- Ruswanto, A., & Senjaya, O. (2023). *Studi Kasus Anak Terlantar Di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>
- Santoso, B. I., Yulyana, E., & Aryani, L. (2022). MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI PERMASALAHAN TUNA SOSIAL DI KOTA BEKASI (Studi pada Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan). *Jurnal MODERAT*, 8(2).
- Sungkono. (2021). Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mukti Wibawa Ponorogo dalam Membentuk Life Skill. In *JCD: Journal of Community Development and Disaster Management* (Vol. 3, Issue 1).
- Susilowati, E. (2022). *THE PRACTICE OF PROTECTION OF ABANDONED CHILDREN IN CHILD SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS* (Vol. 8, Issue 01). Kesejahteraan Sosial.
- Swara, L., & Adhania, O. (2019). *PERILAKU SOSIAL ANAK TERLANTAR DALAM POLA PENGASUHAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) DI KABUPATEN LUMAJANG*. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial->